

# Pendahuluan: Menggagas Kebijakan Kependudukan Baru

---

*Faturochman dan Agus Dwiyanto*

---

Ketika era globalisasi dan informasi belum sepenuhnya diantisipasi, Indonesia harus menghadapi krisis ekonomi dan reformasi yang berlanjut dengan berbagai tuntutan seperti otonomi, demokratisasi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Berbagai hal itu saling terkait satu dengan lainnya. Tuntutan seperti itu pun merupakan hal yang wajar. Sayangnya, masalah-masalah besar itu tidak bisa dipecahkan segera dan serempak, bahkan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa satu permasalahan pun seringkali tidak dapat dipecahkan dengan memuaskan. Karenanya, masalah yang dihadapi Indonesia sekarang menjadi sangat kompleks dan berlarut-larut.

Apakah kaitan antara perubahan-perubahan itu dengan kebijakan kependudukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya dilihat dulu lingkup permasalahan kependudukan. Pada satu sisi, permasalahan itu berputar pada masalah pokok demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian), dan mobilitas (migrasi). Secara sepintas, terutama bagi orang awam, permasalahan ini tampak sederhana. Namun, bila menyadari bahwa permasalahan kependudukan tidak mengkaji individu per individu, masalah yang sesungguhnya tidak

pernah sederhana. Oleh karena itu, pada sisi lain, permasalahan kependudukan bisa melebar ke berbagai permasalahan sosial ekonomi lain. Ketenagakerjaan dan kemiskinan, sebagai contoh, adalah dua isu yang sangat erat dan sering dianggap sebagai bagian dari permasalahan kependudukan. Karenanya, tidak mengherankan bila Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merasa ikut bertanggung jawab dengan masalah kemiskinan dan lembaga ini mempunyai program pengentasan keluarga miskin.

Lebih dari itu, perubahan lingkungan kebijakan seperti meluasnya tuntutan pemberdayaan perempuan, perlindungan HAM, dan otonomi luas membuat kebijakan dan program-program kependudukan yang ada perlu ditinjau kembali relevansinya. Apa yang dulu bisa dilakukan dengan mudah oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan demografinya mungkin tidak lagi bisa dilanjutkan. Arah, isi, dan bahkan strategi implementasi kebijakan kependudukan perlu dirumuskan kembali untuk merespon tuntutan perubahan diatas. Kegagalan dalam merespon tuntutan perubahan itu bisa menciptakan sumber konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat yang bisa mengganggu legitimasi pemerintah.

Suatu kebijakan selalu melibatkan lembaga pemerintah, bisa lebih dari satu, baik sebagai perumus maupun sebagai agen pelaksana. Masih begitu kuatnya peran negara dalam berbagai aspek kehidupan menyebabkan masalah kependudukan seolah-olah menjadi tanggung jawab dan monopoli lembaga-lembaga negara semata-mata. Ketika kehidupan bernegara mengalami perubahan seperti sekarang ini, dimana peran lembaga-lembaga diluar birokrasi pemerintah seperti DPR/D, lembaga swadaya masyarakat, dan partai-partai politik menjadi semakin besar, mau tidak mau peran dan orientasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini mendominasi proses dan arah kebijakan kependudukan akan menjadi berubah pula. Peran dari masyarakat dan DPR/D dalam proses kebijakan kependudukan menjadi semakin besar sehingga arah kebijakan kependudukan yang selama ini cenderung mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan kelompok sasaran tidak lagi dapat dipertahankan.

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang kebijakannya, perlu ditinjau dulu seperti apakah perubahan indikator-indikator kependudukan yang terjadi. Dalam waktu sekitar tiga dasawarsa terakhir, pertumbuhan

penduduk Indonesia mengalami penurunan yang sangat bermakna. Pada periode 1971–1980 angka pertumbuhan penduduk adalah 2,32 persen per tahun, sedangkan pada periode 1995–2000 diperkirakan BPS (1998) sekitar 1,50 persen per tahun. Penurunan yang cukup besar ini disumbang oleh penurunan fertilitas (TFR) dari 5,20 pada sekitar pertengahan tahun tujuh puluhan menjadi 2,78 pada pertengahan tahun sembilan puluhan. Angka kematian, khususnya angka kematian bayi, mengalami penurunan yang tajam juga. Apabila pada hasil Sensus Penduduk 1971 angka kematian bayi adalah 145, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997 angkanya menunjukkan 51. Perubahan yang menggembirakan dari kedua indikator tersebut sangat penting sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan yang baru. Namun, hal itu tidak cukup, masih ada masalah-masalah kependudukan lain yang berindikasi negatif. Penduduk miskin yang masih banyak dan meningkatnya pengangguran akibat krisis adalah dua masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Sementara itu, daya tampung dan daya dukung lingkungan makin lama makin mengkhawatirkan. Dengan kebijakan kependudukan yang ada selama ini, hasil-hasil positif yang diperoleh dikhawatirkan akan tidak bisa berlanjut. Oleh karenanya, perlu ada pengkajian ulang tentang kebijakan-kebijakan kependudukan untuk mengubahnya ke arah yang lebih responsif dengan keadaan pada masa mendatang.

Tuntutan terhadap perubahan kebijakan kependudukan adalah ke arah perubahan yang lebih mendasar, tidak sekedar tambal sulam. Masalah-masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia di masa depan dan perubahan lingkungan kebijakan kependudukan cenderung menuntut perubahan yang bersifat visioner. Misalnya dalam bidang pengendalian fertilitas apakah kebijakan keluarga berencana yang selama ini menempatkan tujuan demografis sebagai sentral masih akan diteruskan? Apakah implementasi kebijakan dan program keluarga berencana yang sentralistis dan seragam masih cukup relevan untuk dilanjutkan? Atau Propinsi dan Kabupaten/Kota akan diberi kewenangan menentukan perlu-tidaknya keterlibatan pemerintah dalam keluarga berencana dan skala keterlibatan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya masing-masing. Juga, dalam bidang mobilitas penduduk dan transmigrasi, perubahan yang mendasar sangat diperlukan. Kapasitas politik dan finansial pemerintah tidak memungkinkan lagi

pelaksanaan kebijakan dan program transmigrasi sebagaimana yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara ini, dilain pihak pemerintah menghadapi masalah baru yang tidak kalah peliknya, yaitu dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi. Melihat rendahnya kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang ada dan besarnya potensi konflik yang ada sekarang ini maka jumlah pengungsi di masa mendatang akan cenderung menjadi semakin besar. Namun, melihat perkembangan yang selama ini terjadi, rasa pesimis bahwa pemerintah kurang mampu memberi respon yang tepat terhadap berbagai tuntutan perubahan itu sangat beralasan. Sejauh ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, Departemen Pengembangan Wilayah dan Pemukiman, dan lembaga lainnya yang terkait belum memiliki visi dan kebijakan yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Meskipun demikian, tuntutan terhadap perubahan kebijakan kependudukan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk memahami tantangan dan perubahan kebijakan kependudukan yang perlu direspon oleh pemerintah maka identifikasi terhadap isu-isu dan masalah kependudukan menjadi amat penting. Uraian berikut menjelaskan beberapa isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam meninjau kembali kebijakan kependudukan yang ada dan merumuskan kebijakan baru yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk tetapi yang lebih penting lagi bisa memperbaiki martabat dan kualitas dari penduduk Indonesia.

Pertama, visi dan arah dari pembangunan kependudukan perlu diperjelas. Sebelum ini, arah kebijakan dan program-program kependudukan lebih banyak ditujukan pada target-target kuantitatif dari parameter-parameter demografis seperti penurunan angka fertilitas dan mortalitas, serta jumlah peserta program transmigrasi. Orientasi seperti ini sebenarnya merupakan hal yang wajar dan dipraktekkan di berbagai negara. Sayangnya, target-target tersebut menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak bisa ditawar dan harus tercapai, apa pun jalan yang harus ditempuh. Akibatnya, di kalangan pelaksana program biasanya diikuti dengan pendekatan yang kurang simpatik terhadap kelompok sasaran. Hasil-hasil dari kebijakan dan program dengan orientasi seperti itu jelas tidak cukup memadai. Kalaupun hasilnya dianggap memadai, seperti cakupan dan prevalensi penggunaan kontrasepsi, keberlangungannya

dipertanyakan. Oleh karenanya, orientasi pada kualitas, baik dalam proses implementasi program maupun hasil yang diharapkan, yaitu kualitas penduduk, sudah saatnya menjadi arah kebijakan dan program yang baru.

Dalam kerangka pemikiran ini penting untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan program kependudukan. Isu ini dalam berbagai kebijakan dan program kependudukan sebelumnya tidak terlalu diabaikan. Hak-hak tersebut dalam bidang kependudukan terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, yaitu hak-hak reproduksi (lihat tulisan Muhadjir Darwin) sehingga orientasi program keluarga berencana sudah saatnya untuk bergeser ke program kesehatan reproduksi (lihat tulisan Sukamdi). Kebijakan penurunan mortalitas juga sangat erat dengan masalah hak asasi warga negara. Pada implementasi, program pemerintah harus menjamin hak-hak itu dalam bentuk, antara lain, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan mulai dari menyediakan informasi, penanganan masalah-masalah kesehatan, dan pelayanan pascapenanganan (lihat tulisan Siswanto Agus Wilopo). Masalah hak asasi juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kependudukan lain, seperti mobilitas penduduk (hak memilih tempat tinggal) dan pemberantasan kemiskinan (hak memperoleh pekerjaan dan upah yang layak).

Kedua, penduduk yang selama ini menjadi sasaran program seringkali tidak tahu ke mana arah mereka akan dibawa. Hal ini terkait dengan hak untuk mengetahui informasi kebijakan dan program kependudukan serta hasilnya. Informasi kependudukan dalam berbagai bentuk data sejauh ini terbatas penggunaannya pada kalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Penduduk atau anggota masyarakat seolah-olah tidak perlu mengetahuinya. Pada era informasi seperti sekarang ini sudah seharusnya setiap orang dapat mengetahui data-data itu. Dengan kata lain, setiap orang berhak mendapatkan berbagai informasi kependudukan (lihat tulisan Ana Nadhya Abrar). Apalagi sebenarnya tersedianya informasi yang memadai mengenai data kependudukan sebenarnya amat penting bukan hanya untuk pemerintah dan para peneliti semata-mata, tetapi juga bagi kalangan bisnis. Akses mereka yang amat terbatas terhadap data demografi dan kependudukan sering mempersulit pengambilan keputusan mereka untuk melakukan investasi. Informasi mengenai jenis,

kualitas, dan jumlah barang dan jasa yang akan mereka produksi amat ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap informasi demografis dan kependudukan yang mereka peroleh. Pembangunan berwawasan kependudukan hanya mungkin dikembangkan kalau sistem informasi kependudukan yang berorientasi pada pengguna bisa dikembangkan.

Sayangnya, data-data kependudukan ini sekarang masih sangat terbatas. Akurasi juga sering dipertanyakan. Data-data yang terbatas, pada umumnya, adalah data-data yang ada pada Badan Statistik Nasional. Kualitas data-data dari lembaga ini sangat tinggi, tetapi karena terbatas pada periode tertentu, seperti sensus, sementara dinamika kehidupan sangat cepat berubah, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan sering kurang sesuai. Sementara itu, data yang lebih aktual seperti data keluarga sejahtera yang dikelola BKKBN dan registrasi penduduk sangat rendah kualitasnya (Faturochman & Dwiyanto, 1998; Faturochman dkk., 1998; Tukiran dkk., 1989). Masalah mendasar ini sepertinya menjadi cerita lama yang berulang-ulang tanpa ada kelanjutan dan perbaikan. Sungguh ironis, pada zaman sekarang ini sebuah toko kelontong memiliki *homepage* dengan data-data yang begitu lengkap dan dapat diakses oleh orang di seluruh dunia, tetapi pemerintahan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten, apalagi kecamatan dan desa, tidak bisa menunjukkan dengan cepat data-data penduduknya yang aktual setiap saat.

Ketiga, berkaitan dengan isu di atas, masalah kelembagaan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program-program kependudukan hingga sekarang belum jelas pengaturannya. Kantor Menteri Negara Kependudukan yang sebelumnya berdiri sendiri, pada awal Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid lembaga ini digabung menjadi satu dengan Kementrian Transmigrasi, dan sekarang tidak jelas keberadaannya. Perubahan ini tentu memiliki implikasi yang tidak sederhana terhadap orientasi dan arah kebijakan kependudukan. Perubahan struktur seperti ini mencerminkan kurang pekanya pemerintah pusat terhadap masalah kependudukan. Sementara masalah transmigrasi dianggap masih dianggap penting, seperti yang tampak dalam struktur kementrian yang digabung dengan Departemen Tenaga Kerja, masalah kependudukan yang lebih luas tidak cukup diperhatikan. Hal seperti ini tentu akan menimbulkan masalah baru terutama dalam

penyusunan prioritas dan arah kebijakan kependudukan di masa mendatang.

Masalah kelembagaan lain adalah tingginya fragmentasi lembaga yang terlibat dalam pembangunan kependudukan. Begitu banyaknya kementerian dan lembaga non-departemen yang membuat kebijakan dan program kependudukan menjadi tumpang tindih dan tidak jelas arahnya. Sekedar contoh, dalam pengembangan data dan informasi kependudukan ada begitu banyak lembaga yang terlibat diantaranya: Badan Pusat Statistik, BKKBN, Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Contoh lain adalah penanganan penduduk miskin yang dilakukan oleh BKKBN, Bappenas, dan beberapa departemen lain. Akibatnya, ada duplikasi dan benturan dari program-program sejenis yang dilakukan oleh berbagai departemen dan lembaga nondepartemen. Belum lagi kuatnya orientasi pada proyek dan anggaran dari departemen dan lembaga nondepartemen menyebabkan mereka berusaha untuk mengembangkan kebijakan dan program yang duplikatif dan berbenturan satu dengan lainnya (Dwiyanto, 2000). Kebijakan kependudukan yang baru semestinya menjelaskan peran dan kedudukan tiap-tiap departemen dan lembaga nondepartemen yang mendukung pencapaian tujuan dari kebijakan kependudukan. Dengan demikian, kemubaziran dapat diminimalisasi.

Keempat, keserasian kebijakan dan program tidak hanya dituntut pada tingkat pusat. Keserasian kebijakan dan program pada tingkat pusat atau nasional dengan daerah seharusnya menjadi salah satu sasaran kinerja program. Sudah lama isu ketidakserasian program pada tingkat pusat dengan daerah terjadi, tetapi selama ini tidak ada upaya yang serius untuk memecahkannya. Desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah sudah ditetapkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1999. Namun, bagaimana desentralisasi dalam bidang pembangunan kependudukan akan dilaksanakan sejauh ini belum tergambar dengan jelas. Dokumen-dokumen yang ada dan pernyataan para pejabat belum menampakkan rencana yang jelas dan melaksanakannya sesuai dengan semangat UU itu. Desentralisasi yang berarti pemberian peran dan kewenangan daerah yang lebih besar sejauh ini masih merupakan retorika daripada upaya pembagian ruang yang lebih besar kepada daerah untuk merumuskan kebijakan dan programnya sendiri. Hal ini adalah salah satu rencana besar dalam perubahan pemerintahan yang

mensyaratkan perencanaan yang matang. Untuk sampai pada tahap itu juga tidak mudah. Masih banyak kendala yang nantinya akan menjadi penghambat. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya yang memadai, khususnya kemampuan birokrasi di daerah untuk mengambil alih tugas dan wewenang yang selama ini bukan menjadi tanggung jawab mereka. Pada sisi lain desentralisasi memungkinkan adanya kinerja yang efektif dan efisien, misalnya pada tingkat kabupaten masalah fertilitas, morbiditas, dan mortalitas ditangani oleh satu dinas yaitu dinas kesehatan.

Kelima, ada beberapa isu lama yang masih terus menjadi perhatian seperti masalah perempuan, penduduk usia lanjut, penduduk miskin, dan penduduk di pedesaan (Dwiyanto, 1997). Beberapa isu ini sering menjadi sorotan pada tingkat kebijakan dan program secara *angin-anginan*. Di samping itu, seperti disebutkan pada pembahasan isu kedua, kelompok penduduk ini lebih banyak dijadikan sebagai objek kebijakan dan program pembangunan tanpa ada upaya secara lebih serius untuk menanganinya.

Indonesia yang aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tingkat dunia untuk masalah kependudukan maupun perempuan, dan meratifikasi hasil-hasilnya, tidak cepat mengimplementasikan dalam bentuk program-program nyata. Perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi, sebagai contoh, sejauh ini sepertinya hanya berputar pada retorika dibandingkan dengan program-program pemerintah yang nyata. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila aparat kehakiman masih ada yang tidak iba dengan korban pemerkosaan (Syafioedin & Faturachman, 2000). Pemerintah sepertinya juga menutup mata terhadap para tenaga kerja perempuan yang nasibnya seperti sapi perahan, baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri (Triantoro, 1999). Dengan demikian, upaya *gender mainstreaming* (lihat tulisan Irwan Abdullah) masih jauh dari harapan.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut juga tidak jelas. Ada kesan yang kuat bahwa permasalahan penduduk usia lanjut diserahkan pada keluarga. Sikap seperti ini menunjukkan ketidaksensitifan pemerintah terhadap masalah yang berkembang. Bagaimana mungkin orang usia lanjut dapat mengandalkan anak-anaknya untuk memelihara mereka sementara bentuk dan struktur

keluarga telah berubah drastis (Effendi, 1996)? Sikap tidak mengacuhkan kondisi usia lanjut seperti ini menyebabkan orang-orang lanjut usia merasa sangat tidak terjamin hidupnya. Mereka kemudian ingin mati saja daripada harus menderita (Sukamdi dkk., 1999).

Masih banyak isu kependudukan yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah. Tidak semua masalah-masalah tersebut dapat dikaji dalam buku ini. Namun, sebagian dari masalah kependudukan yang dibahas dalam buku ini diharapkan dapat menjadi wacana yang terus-menerus dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan kependudukan Indonesia. Buku ini bukan buku tentang kebijakan kependudukan, melainkan merupakan kumpulan pemikiran para ahli dan pemerhati masalah kependudukan yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan dan program-program kependudukan yang baru.

Dua tulisan awal masing-masing dari Tukiran dan Sukamdi memaparkan perkembangan kependudukan selama ini, yaitu masalah-masalah kependudukan yang masih harus disikapi secara kritis. Keduanya menempatkan isu kependudukan dengan isu pembangunan sekaligus karena interaksi di antara keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Di dalam dua tulisan itu juga dicoba dirumuskan beberapa hal penting yang perlu menjadi fokus dalam kebijakan yang akan datang.

Masih senada dengan dua tulisan pertama, tulisan Prijono Tjiptoherijanto juga memaparkan perkembangan kependudukan. Bedanya, ada tekanan yang cukup besar pada tulisan Tjiptoherijanto dalam membahas masalah kependudukan pada era politik baru yang disebutnya era reformasi. Perubahan politik, sosial, dan ekonomi telah berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian-pencapaian pembangunan kependudukan. Ini bukan sesuatu yang harus disesali, tetapi justru membuka mata semua pihak bahwa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini tidak cukup tangguh menghadapi perubahan besar yang sebenarnya sedang melanda seluruh dunia. Tantangan ini harus dihadapi dengan jalan melakukan reorientasi kebijakan kependudukan Indonesia, demikian inti tulisan Muhadjir Darwin. Meskipun tulisannya lebih banyak mengkaji pada kebijakan penurunan angka fertilitas, beberapa ide tulisannya menjadi pedoman yang banyak dianut dalam menyusun kebijakan. Contohnya adalah orientasi pada hak-hak asasi manusia.

Tiga tulisan berikutnya berbicara banyak tentang masalah mortalitas, khususnya kematian bayi dan ibu. Djaswadi Dasuki memaparkan berbagai masalah dan tantangan dalam mengupayakan penurunan kematian maternal dan perinatal. Ada dua masalah yang banyak disoroti dalam tulisan ini. Pertama adalah masalah data yang akurat tentang angka kematian dan kedua tentang pelayanan kesehatan sebagai salah satu cara penting untuk menurunkan angka kematian bayi dan maternal. Secara lebih luas, Satoto berusaha meninjau kembali strategi penurunan kematian bayi dan maternal berdasarkan pada pengalaman masa lalu. Sementara itu, tulisan Siswanto Agus Wilopo secara rinci dan komprehensif membahas kebijakan kematian maternal. Sekali lagi, ketiga tulisan tersebut mengharapakan kepada semua pihak untuk melakukan reorientasi dalam menangani masalah kependudukan.

Tiga tulisan lain topiknya berbeda antara yang satu dengan lainnya. Redistribusi penduduk, yang selama ini dikenal dengan program transmigrasi, dipaparkan berdasarkan urutan sejarah. Dari pemaparan itu tampak jelas bahwa banyak kesalahan yang diulang-ulang dalam penyusunan kebijakan dan program. Ida Bagoes Mantra dan Nasrudin Harahap memberikan peringatan agar pada masa depan jangan lagi ada kesalahan yang sama. Ini bisa berlaku bila perubahan orientasi, antara lain dengan otonomi daerah, benar-benar bisa berjalan.

Masalah perempuan, yang proporsinya lebih besar daripada penduduk laki-laki disorot oleh Irwan Abdullah. Salah satu kekeliruan besar dalam pembangunan adalah kurang besarnya perhatian terhadap perempuan. Bahkan, ketika upaya untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan dilakukan, yang terjadi justru memberikan beban yang lebih berat kepada mereka. Tahap *women in development* ini kemudian diubah menjadi tahap *gender and development* dengan maksud melihat kembali posisi laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, tidak seperti yang pertama. Pada tahap kedua ini kemajuan yang diperoleh dalam melakukan reposisi perempuan tidak berjalan secara memuaskan. Karenanya, diarahkanlah konsep baru yang secara struktural dan sistemik dapat memacu pembangunan perempuan yang dikenal dengan *gender mainstreaming*. Konferensi Beijing yang menghasilkan rencana tindakan (*plan of action*) untuk diadopsi dalam berbagai kebijakan kependudukan merupakan upaya penerapan dari konsep baru itu. Kenyataan menunjukkan bahwa ini pun berjalan lambat. Tulisan dalam

buku ini diharapkan menjadi salah satu bagian yang dapat memacu perkembangan pembangunan perempuan seperti yang diharapkan dalam konsep terakhir.

Tulisan lain dipaparkan oleh ahli komunikasi, Ana Nadhya Abrar, yang mulai menekuni masalah kependudukan. Sejauh ini masalah komunikasi kependudukan belum banyak dicermati sehingga tulisan ini menjadi stimulan yang tepat untuk mengkritisi masalah ini pada masa-masa mendatang.

Akhirnya, Agus Dwiyanto mengulas kembali beberapa isu kebijakan kependudukan dengan menekankan pada pentingnya perubahan visi dan misi lembaga pemerintah untuk menjawab tantangan baru. Di samping itu, ia menambahkan bahwa secara kelembagaan masalah kependudukan di masa mendatang tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah pusat seperti yang terjadi selama ini tetapi juga harus melibatkan pihak lain seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, penanganan masalah kependudukan bisa berjalan secara lebih proporsional.

Dari tulisan yang ada, sekali lagi, tidak semua masalah dan kebijakan kependudukan tercakup dan didiskusikan dalam buku ini. Semoga ada yang berminat untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dalam buku ini.

## Referensi

- Biro Pusat Statistik. 1998. *Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi 1995-2005*. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus 1997. "From fertility control to quality-oriented population and human resource development policies," in G.W. Jones & T.H. Hull (eds.), *Indonesia Assesment: Population And Human Resouces*. Canberra: Australian National University & Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Dwiyanto, Agus 2000. "Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya," paper disampaikan pada Prokenas. Hotel Century Sapphire, Yogyakarta, 25 April.
- Effendi, Sofian. 1996. "Perubahan struktur keluarga dalam perspektif pencapaian keluarga sejahtera," dalam Agus Dwiyanto, Faturochman, Marcelinus Molo, dan Irwan Abdullah (eds.), *Penduduk dan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Faturochman dan Agus Dwiyanto 1998. "Validitas dan reliabilitas pengukuran keluarga sejahtera," *Populasi* 9(1): 37-49.
- Faturochman, T.H. Hull & Agus Dwiyanto. 1998. "Validity and reliability of family welfare measure: an experiment in Central and East Java," *Journal of Population*, 4( 2): 33-55.
- Sukamdi, Helly P. Soetjipto, Umi Listyaningsih, Faturochman, Astuti Farida. 1999. "Kondisi sosial ekonomi dan perawatan yang diinginkan penduduk usia lanjut," Seminar Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Desember.
- Syafioedin, Hisyam dan Faturochman. 2000. *Hukuman bagi Pemerkosa dan Perlindungan bagi Korban*. Yogyakarta: Draf hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Triantoro, B.W. 1999. "Migrasi legal dan ilegal ke Malaysia Barat: kasus migrasi internasional di Pulau Lombok, NTB," *Populasi* 10( 2): 1-16.